

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK

Mayang Ratnasari, Ismail Navianto, Paham Triyoso

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: aryamayang@ymail.com

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pergaulan yang semakin luas memiliki dampak negatif pada anak dengan meningkatnya tindak asusila serta bergesernya nilai moral. Salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan dilakukan anak, yang kepentingan perlindungan hukumnya lebih besar daripada orang dewasa. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pasal 15 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 masyarakat di Kediri juga peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana persetubuhan pasal 81 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang dilakukan anak akibat dari pornografi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik random serta teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Kehidupan bermasyarakat merupakan tempat bagi anak-anak, dimana mereka bersosialisasi serta membentuk kepribadian, moral, dan karakter selain di keluarga. Dalam ketentuan pasal 15 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak yang mengakibatkan tindak pidana persetubuhan pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2003, serta menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Kata Kunci: Pornografi, Anak, Persetubuhan

Abstract

The development of science and technology as well as an increasingly broad guidelines have a negative impact on children with increased acts of wanton and bad change occurred against the moral values. One of them is a criminal offence, which made promiscuity interests legal protection greater than the adults. Therefore the purpose of this research is to find out and analyze the implementation of chapter 15 Act No. 44 of 2008 public participation also in Kediri society in preventing crime promiscuity section 81 Act No. 11 of 2002 made children the consequences of pornography. This research using methods approach juridical with technical and sociological analysis of data random technique using methods descriptive analysis. Social life is a place for children where they socialize personality, and form morals and character than in the family. In the provisions of article 15 act no 44 of 2008 on pornography intended to prevent possible early influence against child pornography, resulting in a criminal offense coitus article 81 the no.23 of 2003 and reaffirmed related to protection against a specified in legislation. Keywords: Pornography, Child, Intercourse

A. Pendahuluan

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain memiliki manfaat yang positif tetapi juga negatif yakni berakibat terhadap meningkatnya perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang berpengaruh pada moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Pergaulan yang semakin luas berakibat pula pada anak yang terkena dampak negatifnya dengan meningkatnya tindak asusila serta bergesernya nilai moral.

Dalam kehidupan bermasyarakat merupakan tempat bagi anak-anak, dimana mereka bersosialisasi serta membentuk kepribadian, moral, dan karakter selain di keluarga. Salah satu pergeseran nilai moral adalah persetubuhan pada pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan korbannya adalah anak ditambah lagi dengan pelaku anak. Sedangkan anak kepentingan perlindungan hukumnya lebih besar daripada perlindungan hukum orang dewasa. Sebagai perlindungan hukum terhadap anak beberapa diantaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Walaupun begitu anak sebagai pelaku yang melakukan kejahatan ini atau lebih patut disebut anak nakal sesuai dengan UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang masih diberlakukan, sanksi yang dijatuhkan terhadap anak mengatur bahwa ancaman hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum dari ketentuan pidana yang akan dikenakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”;

Pasal 27 yang berbunyi

“Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa”; dan 28 ayat (1) yang berbunyi

“Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa”

Dalam ketentuan pasal 15 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.

Pendidikan dari keluarga sejak dini memang sangat diperlukan serta peran serta masyarakat baik individu maupun bersama sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun dalam hukum terdapat *Teori Fictie Hukum* yakni bahwa setiap orang dianggap tahu mengenai apa yang telah diundangkan oleh negara. Di undang-undang memang telah ditulis mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak akibat dari pornografi namun sebagian besar masyarakat kurang tahu bahwa mereka juga memiliki peran serta dan kewajiban tersebut. Hal ini yang dipertanyakan mereka memang belum mengetahui tentang peran yang dimiliki karena kurang sosialisasi dari pemerintah atau memang cenderung kurang peduli.

Fakta memprihatinkan di beberapa daerah di Indonesia dalam sebuah penelitian yang dilakukan Elly Risman Musa, S.Psi¹ seorang psikolog dan sekaligus Direktur Yayasan Kita dan Buah Hati. Beliau sudah sering menjadi pembicara dan nara sumber seminar di seluruh dunia yang membahas tentang parenting, psikologi anak dan remaja mengungkap angka yang sangat mengerikan. Tak kurang dari 98 persen anak-anak Indonesia pernah mengakses media-media berbau pornografi. Dampaknya mulai terasa. Beberapa kasus kejahatan seksual yang dilakukan anak dan remaja, pelaku mengaku terinspirasi media porno. Seperti kasus yang terjadi di Semarang, diberitakan ada anak SMP tertangkap polisi karena mencuri sepeda motor bersama teman seusianya. Di depan polisi dia mengakui mau menjual motor curian itu dan uangnya akan dipakai untuk membiayai aborsi sang pacar yang sudah hamil dua bulan.

¹Psikolog Lulusan Universitas Indonesia Tahun 1979, (online)
<http://profil.merdeka.com/indonesia/e/elly-risman-musa/> (02 Oktober 2013)

Kelompok anak SMP ini akhirnya diketahui sudah lama akrab dengan VCD porno.²

Sedangkan menurut data yang diambil dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri laporan polisi ada kasus persetubuhan oleh anak pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013 kali ini di daerah Kec.Kayen Kidul Kab.Kediri korbannya satu namun dengan tiga (3) tersangka yang berbeda korban berumur kurang dari 18 tahun sedangkan tersangka 2 diantaranya 16 tahun dan satunya 17 tahun. Kini korban tengah dalam keadaan hamil 6 bulan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul **“Peran Serta Masyarakat Dalam Implementasi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak”**

A. Masalah/ Isu Hukum

1. Bagaimana implementasi pasal 15 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi di masyarakat Kediri?
2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana persetubuhan yang diatur pasal 81 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, akibat dari pornografi?

B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitiannya di wilayah Kediri tepatnya di Desa Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri. Karena terdapat kasus persetubuhan yang dilakukan oleh 3 orang pelaku yang berbeda dengan 1 korban dengan kurun waktu yang berdekatan, serta dilakukan oleh anak. Jenis dan sumber data yakni data primer berupa wawancara secara langsung dengan responden yang ada di

² Redaksi MC-Online, **Ironi Sebuah Negeri Muslim**(online), <http://mualaf.com/index.php/puasa/item/158-pornografi-ironi-sebuah-negeri-muslim> Pornografi, (23 September 2013)

lokasi penelitian. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yaitu Desa Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri. Jenis data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan. Serta sumber data sekundernya peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Teknik memperoleh data dengan wawancara dan studi kepustakaan dan dokumentasi. Populasi yakni seluruh warga Desa Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni 5 warga Desa Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri. Teknik sampling yang digunakan adalah random dimana wawancara dilakukan dengan cara memilih 5 orang secara acak. Menggunakan teknik deskriptif analisis untuk menganalisis data. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Peran Serta Masyarakat adalah ikut sertanya anggota masyarakat Desa Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri dalam memecahkan permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh anak akibat dari pornografi yang ada di masyarakat tersebut. Baik peran preventif maupun represif masyarakat. (2) Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu kebijakan yang melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pasal 15 UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi. (3) Pasal 15 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah berbunyi sebagai berikut “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”. (4) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. (5) Tindak Pidana Persetubuhan adalah Tindak pidana tindak pidana yang memenuhi pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan

terhadap anak. (6) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dinyatakan belum dewasa oleh undang-undang yang melakukan Tindak Pidana Persetubuhan.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hukum dibuat dengan tujuan tertentu. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Peraturan maupun penerapan suatu undang-undang memiliki 3 tujuan tersebut. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Suatu peraturan perundang-undangan dibuat adalah untuk melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat. Kontrol sosial dimaksudkan supaya dapat mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan adanya kontrol sosial masyarakat dapat melakukan suatu perubahan sosial yang lebih baik. Masyarakat sebagai *stakeholder* dalam penerapan hukum, masyarakat selalu diuntut partisipasi aktifnya dalam realita kehidupan masyarakat dan memberikan arah bagi perjalanan peradaban bangsa, khususnya dalam hal ini adalah memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi sehingga mencegah anak melakukan tindak pidana persetubuhan. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang moralitasnya harus dijaga. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Penerapan hukum yang baik mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah – tengah masyarakat. Karena dapat menciptakan ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Menurut Talcott Parsons “hukum dan bidang-bidang lain dalam kehidupan masyarakat berkaitan satu dan yang lainnya.”³³ Dalam penegakan hukum terdapat 3 unsur yang terkait dalam sistem hukum menurut Lawrence

³³ Rahardjo, Satjipto, **HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia**, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009 hal 258

Friedman yaitu “struktur, substansi dan kultur⁴”. Jika ketiganya dapat berjalan dengan baik maka implementasi suatu undang-undang akan terlaksana baik pula. Pasal 15 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”.

Masyarakat Desa Mukuh kurang mengetahui bahwa undang-undang pornografi telah mengatur sedemikian rupa untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi dan dapat mencegah terjadinya persetubuhan.

Perangkat desa setempat, serta beberapa warga menyebutkan bahwa kurang adanya sosialisasi pemerintah terkait undang-undang tentang pornografi. Ada juga warga yang tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Namun menurut mereka, melindungi anak-anak dari pengaruh pornografi adalah suatu kewajiban, apalagi yang sudah menjadi orang tua. Kesadaran sebagai orang tua yang mendorong memberikan perlindungan bagi anak dan menjaukan anak dari pengaruh negatif. Apalagi dari tindak pidana persetubuhan yang disebabkan oleh pengaruh pornografi. Pasal 15 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”.

Masyarakat Desa Mukuh kurang mengetahui bahwa undang-undang pornografi telah mengatur sedemikian rupa untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi yang dapat mencegah terjadinya persetubuhan.

Perangkat desa setempat, serta beberapa warga menyebutkan bahwa kurang adanya sosialisasi pemerintah terkait undang-undang tentang pornografi. Ada juga warga yang tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Namun menurut mereka, melindungi anak-anak dari pengaruh pornografi adalah suatu kewajiban, apalagi yang sudah menjadi orang tua. Kesadaran sebagai orang tua yang mendorong memberikan perlindungan bagi anak dan menjaukan anak dari pengaruh negatif. Apalagi dari tindak pidana

⁴ Hatta, Mohammad, **Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)**, Galangpress, Yogyakarta 2008 hal 75

persetubuhan yang disebabkan oleh pengaruh pornografi. Faktanya yang terjadi di Desa Mukuh penerapan pasal 15 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum terlaksana dengan baik sehingga tujuan dari pasal 15 UU pornografi belum dapat tercapai.

Pornografi memiliki dampak negatif yang berbahaya bagi perkembangan anak serta dapat memicu terjadinya tindak pidana persetubuhan seperti hasil wawancara dengan salah satu pelaku persetubuhan yang masih tergolong dalam usia anak menyebutkan bahwa, Pelaku awalnya sering membuka situs game online di internet, secara tidak sengaja seringkali melihat gambar-gambar tidak seronok yang muncul pada iklan-iklan di internet. Hal ini memicu rasa ingin tahunya kemudian pelaku mencari-cari tahu tentang hal-hal yang berbau persetubuhan. Mulai dari tulisan-tulisan cerita dewasa sampai film yang di dapatnya dari teman-temannya. Karena terlalu sering melihat hal-hal yang berbau pornografi akhirnya pelaku ingin mempraktekkan apa yang telah diketahuinya. Sehingga dia mempraktekkannya dengan pacarnya atau dalam kasus ini sebagai korban.⁵

Anak yang sudah kecanduan pornografi susah untuk mengontrol perilakunya. Anak adalah seorang peniru yang pintar, apa yang dilihat dan didengarnya dari orang yang lebih dewasa serta lingkungannya akan ditirunya. Kemampuan anak untuk menyaring suatu informasi dapat dikatakan rendah, anak mungkin sudah mampu membedakan yang baik dan buruk, namun pemikirannya belum jauh ke depan bagaimana akibat dari suatu tindakan bila dilakukan. Bagi mereka orang dewasa adalah suatu model atau sumber yang paling baik dan nyata untuk ditiru. Anak yang sering melihat pornografi ini dalam dirinya timbul kegelisahan karena adanya hasrat seksual yang ingin disalurkan padahal belum saatnya. Sehingga dapat mengakibatkan tindakan seks bebas atau persetubuhan yang dilakukan oleh anak baik itu dengan cara memaksa atau suka sama suka. Seringkali persetubuhan yang dilakukan oleh anak terjadi dengan teman-teman sebayanya yang sudah saling mengenal sebelumnya. Maka terjadilah tindak pidana persetubuhan pada pasal 81UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi,

⁵ Hasil wawancara dengan IR sebagai pelaku persetubuhan oleh anak pada tanggal 7 Desember 2013, diolah

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan *lex specialis derogate lex generalis* dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUH Pidana. Meskipun begitu bila pelaku adalah anak selain dijerat dengan pasal 81 UU perlindungan anak, namun anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana ini atau lebih patut disebut anak nakal sesuai dengan UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang masih diberlakukan, sanksi yang dijatukan terhadap anak mengatur bahwa ancaman hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum dari ketentuan pidana yang akan dikenakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”;

Pasal 27 yang berbunyi

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa”; dan 28 ayat (1) yang berbunyi “Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa

Anak kepentingan perlindungan hukumnya lebih besar daripada perlindungan hukum orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan ini bukan merupakan subjek tindak pidana, yang dapat dipidana seperti layaknya orang dewasa, tanpa mempertimbangkan bahwa anak adalah

generasi muda yang masih memiliki masa depan yang panjang, serta moral dan karakternya masih dapat diperbaiki.

Menurut wawancara dengan Ni Ketut Suarningsih Jabatan sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri beberapa faktor yang mendukung terjadinya persetubuhan beberapa diantaranya adalah: hawa nafsu; kurangnya perhatian orang tua; film porno; gambar porno; kemajuan sumber informasi dan teknologi dan pergaulan anak yang terlalu bebas.⁶

Masyarakat turut serta dalam berperan dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum dan menanggulangi terjadinya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, karena hukum itu sendiri terbentuk dari masyarakat serta ada untuk melindungi masyarakat.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan peran keluarga dan berbagai pihak serta masyarakat. Telah diatur secara jelas di undang-undang yakni dalam pasal 15 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”.

Kemudian peran serta masyarakat juga diatur dalam UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 72 yang berbunyi:

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Masyarakat adalah suatu wadah dimana sosialisasi berlangsung dan berinteraksi secara langsung dengan tindak pidana. Masyarakat untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana persetubuhan melakukan peran-peran yakni:

⁶ Hasil wawancara dengan Ni Ketut Suarningsih Jabatan sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri tanggal 27 Agustus 2013, diolah

1. Peran Preventif

Peran preventif dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan akan terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Koordinasi dengan semua pihak yang terkait penting untuk dilakukan guna menemukan solusi dalam mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak. Pihak yang terkait diantaranya: sekolah, pemerintah daerah, kepolisian, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkhususkan perhatiannya pada anak seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kediri
- b. Mengikuti program-program yang dijalankan oleh pemerintah maupun para akademisi seperti penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum berfungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- c. Menggerakan perkumpulan pemuda seperti karang taruna untuk ronda dan lebih mengawasi tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana persetubuhan. Contohnya tempat-tempat yang sepi. Apabila dapat diusir dan di peringatkan maka akan dilakukan hal tersebut terlebih dahulu. Kemudian bila susah untuk diperingatkan maka tindakan selanjutnya adalah melaporkan ke pihak yang berwenang bila terdapat gerak-gerik yang mencurigakan.

2. Peran Represif

- a. Dalam hal sudah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Perbuatan tersebut dilaporkan kepada perangkat desa dalam kasus seperti ini biasanya Ketua RT, Ketua Dusun, maupun Lurah. Kemudian pelaku diminta bertanggung jawab. Ada yang diselesaikan melalui jalur kekeluargaan misal dengan cara pelaku mengawini korban, apalagi bila si korban sampai hamil. Namun ada pula yang dilaporkan ke pihak kepolisian.
- b. Perangkat desa menemani keluarga korban ke pihak kepolisian bila kasusnya di teruskan ke jalur hukum.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak peran serta masyarakat telah dijelaskan dalam pasal 72 yang berbunyi:

1. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa

Menurut wawancara dengan Suci Budi A,S.Ag sebagai Perangkat Desa, Sebagai orang tua meskipun agak risih untuk menyampaikan isu pornografi kepada anak, namun mau tidak mau, ada tuntutan untuk menyampaikan isu ini secara jujur dan transparan. Serta jangan sampai anak mengetahui makna pornografi dari sebuah gambar atau sejenisnya dari kesengajaan, inisiatif anak atau pihak ke-tiga yang belum tentu memahami sikap, pengetahuan, dan perilaku anak. Karena dampaknya buruk sekali bagi anak. Kemudian dapat dilakukan diskusi antara anak dan kedua orang tua. Hasil dari diskusi adalah anak dapat memahami makna pornografi, sehingga anak memiliki pengetahuan, selanjutnya anak dapat bersikap, dan anak mampu menghindari hal yang terkait dengan pornografi sebagai individu yang berperilaku positif dan bertanggungjawab. Karena kehadiran kedua orang tua dalam diskusi mampu memberi gambaran yang dapat dipahami dan dimengerti oleh anak. Sehingga anak tidak berimajinasi mengenai hal-hal di luar kemampuan anak. Dalam memaknai pornografi jelas ada perbedaan antara anak dan orang tua. Hal ini wajar, sesuai dengan usia, kematangan dan perkembangan anak.⁷

Kemajuan teknologi dan lingkungan yang semakin modern menjadi hal yang menakutkan bagi para orangtua. Pornografi menjadi hal yang menakutkan bagi para orangtua sekarang ini. Konten pornografi dan pornoaksi seringkali terpampang vulgar tanpa dapat disensor. Anak-anak kecil disuguhkan pemandangan yang tidak sepatutnya mereka lihat. Tayangan televisi yang berisikan artis-artis yang memakai baju kurang sopan, adegan, pacaran, ciuman, dan aktifitas yang mengarah kepada perbuatan seksual seakan menjadi sesuatu

⁷ Hasil Wawancara dengan Suci Budi A,S.Ag sebagai Perangkat Desa pada 26 Agustus 2013,diolah

yang biasa. Adapula terdapat *website* di internet yang dengan bebasnya menyuguhkan berita aktifitas-aktifitas asusila baik yang dilakukan oleh para aktor dan aktrist, para pejabat, dan para pelajar, bahkan oleh orang biasa sekalipun. Serta masih banyaknya iklan-iklan yang mengarah pada pornografi. Semua aktifitas penyimpangan sosial tersebut dapat dilihat secara langsung tanpa harus mengeluarkan upaya yang keras untuk mendapatkannya. Kadang iklan-iklan yang berbau pornografi muncul dengan sendirinya tanpa diinginkan.

Kaitan antara pasal 15 UU No 44 tahun 2008 dengan tindak pidana persetubuhan pasal 81 UU No 23 tahun 2002 pasal 15 merupakan sebuah pasal yang intinya adalah pecegahan terhadap anak untuk melakukan tindak pidana persetubuhan. Persetubuhan oleh anak salah satu sebab terjadinya adalah dari pornografi. Apabila anak dilindungi dari pengaruh pornografi dan mencegah aksesnya dari pornografi sedikit banyak akan mengurangi terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak.

Di sini bukan berarti mengenai bagaimana peran orang tua dalam menjaga anaknya dan sejauh mana batasan-batasan orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang memang belum tercantum batasan-batasan mengenai perlindungan yang diberikan orang tua terhadap anak, namun orang tua memiliki peran preventif sebagai upaya pencegahan. Walaupun batasan-batasan itu belum ada setidaknya dasar-dasar moral anak dibentuk dalam keluarga dan dipengaruhi oleh orang tua sebagai orang terdekat anak. Sedangkan masyarakat sekitar mempengaruhi perilaku anak setelah orang tua. Bagaimanapun perilaku anak terbentuk di dalam pergaulan sehari-hari. Jadi antara satu dan lainnya saling berkaitan. Anak sangat perlu diberikan perlindungan baik secara fisik maupun sosialnya. Pasal 15 UU No 44 tahun 2008 merupakan salah satu upaya preventif supaya tidak terjadi tindak pidana persetubuhan pasal 81 UU No 23 tahun 2002. Setidaknya jika penerapan pasal 15 UU No 44 tahun 2008 dilaksanakan dengan baik maka dapat mengurangi terjadinya tindak pidana persetubuhan pasal 82 UU No 23 tahun 2002.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah penulis kemukakan dapat disimpulkan bahwa implementasi pasal 15 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi di masyarakat di Kediri belum terlaksana dengan baik. Sedangkan peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana persetubuhan pasal 81 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh anak akibat dari pornografi yakni dapat dilakukan secara preventif sebagai upaya pencegahan dan represif sebagai tindak lanjut untuk menanggulangi apabila perkara sudah terjadi.

2. Saran

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Ditangan anak masa depan bangsa ini digantungkan. Masalah persetubuhan yang disebabkan pengaruh pornografi oleh anak perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait seperti orang tua, guru, pemerintah, serta masyarakat sekitar.

D. Daftar Pustaka

Hatta, Mohammad, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Galangpress, Yogyakarta 2008

Rahardjo, Satjipto, *HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Redaksi MC-Online, Ironi Sebuah Negeri Muslim (online), <http://mualaf.com/index.php/puasa/item/158-pornografi-ironi-sebuah-negeri-muslim> Pornografi, (23 September 2013)